



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PALMATAK

Tahun

2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palmatak periode 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dok ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Palmatak dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dok ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Palmatak sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama lima tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Palmatak.

TebangLadan, 04 Juni 2025



GAMBAR PALMATAK,

WAN RUMADY, S.Pd.SD

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19680102 199103 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,DAN ISU STRATE GIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Aparatur.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	22
2.5. Permasalahan dan isu - isu strategis.....	24
2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
2.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	28
2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
2.10. Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan dan Sasaran	34
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN SER TA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	38
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	42
BAB V PENUTUP	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	13
Tabel 2.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	14
Tabel 2.3. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	14
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung.....	17
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palmatak Kab. Kep.Anambas.....	19
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	21
Tabel 2.7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah.....	35
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	36
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	39
Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	42
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	43
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Palmatak Kab. Kep. Anambas.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Palmatak merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Sebagai kecamatan yang didominasi oleh wilayah kepulauan, Kecamatan Palmatak menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, distribusi layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Palmatak juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dok Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Palmatak periode 2025–2029 menjadi Dok penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan untuk lima tahun ke depan. Dok ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Potensi lokal Kecamatan Palmatak, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi Dok strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Palmatak dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan positif yang bezrdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palmatak adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahl
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palmatak periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai Dok perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dok ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Palmatak dengan

kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan Dok panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Palmatak selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Palmatak, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Palmatak periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan- hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan dan berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Palmatak, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Palmatak. dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan. dan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

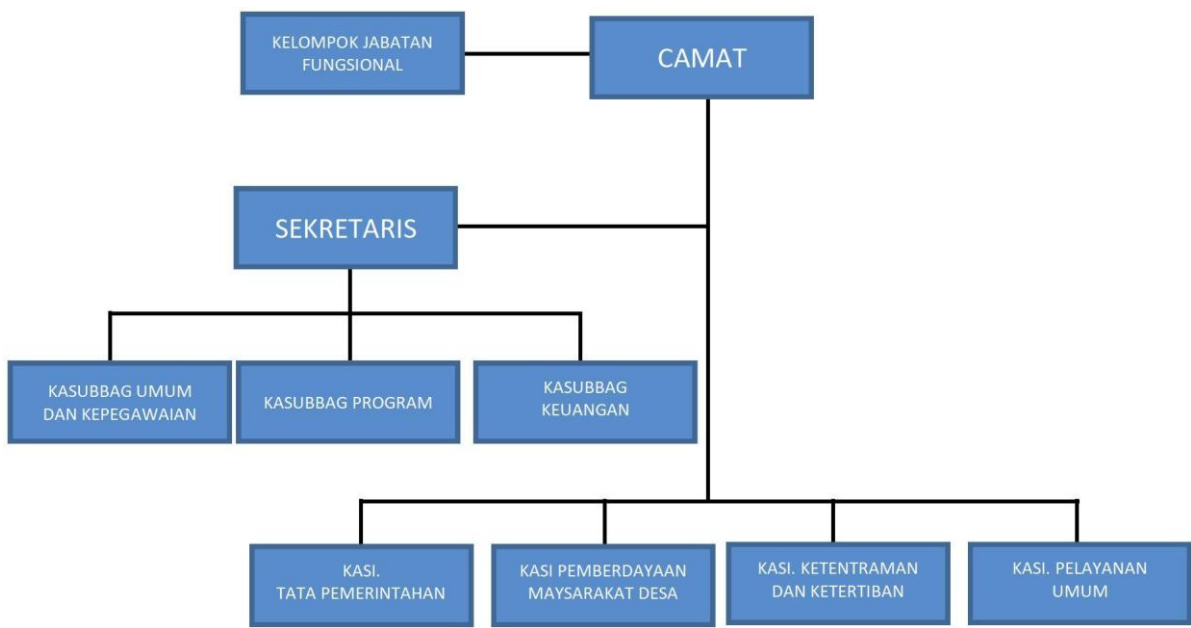
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Palmatak memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Tugas ini mencakup koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas daerah.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Palmatak
Kabupaten Kepulauan Anambas



Palmatak menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta menyelaraskan program kerja dengan kebijakan daerah.

2. Pelayanan Publik

Menyelenggarakan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk penerbitan Dok kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan lainnya.

3. Pelaksanaan Pembangunan

Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6. Pelaksanaan Pembangunan

Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

7. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

9. Pelaksanaan Pembangunan

10. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

11. Pengelolaan Keuangan dan Aset

12. Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
14. Pelaksanaan Pembangunan
15. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
16. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
18. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
19. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
20. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
21. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
22. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
24. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
25. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
26. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
27. Pelaksanaan Pembangunan
28. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
29. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki

dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
31. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
32. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
33. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
34. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
35. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
36. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
37. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
38. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
39. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
40. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.
41. Pelaksanaan Pembangunan
Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

42. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

43. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut Struktur Organisasi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Palmatak Per Januari 2025 berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) orang terdiri dari 19 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Palmatak Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Tk. I	Eselon III.a	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	1 Orang
Penata	Eselon IV.a	4 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	3 Orang
Penata	Staf	1 Orang
Penata Muda Tk. I	Staf	1 Orang
Penata Muda	Staf	5 Orang
Pengatur Tk. I	Staf	3 Orang
PPPK	Staf	26 Orang
Jumlah		45 Orang

- b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**
Adapun komposisi pegawai Kecamatan Palmatak tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1.	PNS : 19	S1 : 13 Orang
		D3 : 3 Orang
		SMA/SMK : 3 Orang
2.	PPPK : 26 Orang	S1 : 11 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 13 Orang
Jumlah		45 Orang

- c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Palmatak didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	12	7
PPPK	10	16
Jumlah	22	23

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Palmatak. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik

sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Palmatak juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Palmatak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor	1 Unit	2020
31	Printer	3 Unit	2023
32	Laptop	3 Unit	2023

2.1 Kinerja Pelayanan

Kecamatan Palmatak terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan Dok kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Palmatak juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Palmatak aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengurusan Dok, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Palmatak menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%	60%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Kecamatan Palmatak terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi B (69) pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dari kategori B (81,29) pada tahun 2021 menjadi A (87) pada tahun 2026, menunjukkan keberhasilan Kecamatan Palmatak dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Palmatak telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2025 dengan capaian awal sebesar 20% dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Palmatak untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palmatak, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Palmatak Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.4.816.629.452	Rp.4.410.245.789	Rp.4.513.858.945	Rp.4.462.233.022,49	Rp.4.871.505.127	Rp.4.919.752.672	Rp.4.626.117.750	Rp.4.362.770.825	Rp.4.377.506.559	Rp.4.106.626.536	Rp.0	Rp.0	81,67	90,43	81,85	83,03	Rp.0	Rp.0	Rp.4.665.704.167,92	Rp.4.368.255.418
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.774.199.575	Rp.318.649.380	Rp609.400.100	Rp.221.582.270,00	Rp.630.785.844	Rp.327.284.270	Rp.615.108.700	Rp.318.649.380	Rp.607.667.200	Rp.221.455.500	Rp.0	Rp.0	99,99	100	98,84	99,94	Rp.0	Rp.0	Rp.341.819.844,8	Rp.293.813.463,3
Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.40.217.000	Rp.78.011.200	Rp131.670.600	Rp.159.390.382	Rp.195.125.504	Rp.265.297.075	Rp.39.761.000	Rp.77.954.280	Rp.126.922.300	Rp.159.019.000	Rp.0	Rp.0	99,04	99,93	95,24	99,77	Rp.0	Rp.0	Rp.96.441.796,5	Rp.67.276.096,67
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.24.375.000	Rp.11.175.000	Rp.93.159.300	Rp.102.990.000	Rp.52.616.000	Rp.117.841.000	Rp.20.877.500	Rp.11.175.000	Rp.90.291.400	Rp.102.860.000	Rp.0	Rp.0	85,57	100	97,79	99,85	Rp.0	Rp.0	Rp.34.334.500	Rp.37.533.983,33

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palmatak serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan di Kecamatan Palmatak menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai.

3. Pengelolaan Anggaran yang Terbatas

Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Palmatak juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Palmatak menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antarwilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Perubahan Iklim

Kecamatan Palmatak yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Persaingan dengan Wilayah Lain

Dalam konteks pengembangan pelayanan dan pembangunan, Kecamatan Palmatak perlu bersaing

dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah..

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Palmatak dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Palmatak memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Kemajuan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Palmatak untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan.

3. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.

2.5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Palmatak tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan Isu

strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Palmatak tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antardaerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Palmatak dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Palmatak perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Palmatak dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	- Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		- Ketidacukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palmatak

terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) dan Ke-5 (Kelima) yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi” dan “Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan”.

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Palmatak yang akan dituangkan dalam Dok Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel

dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Palmatak melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Palmatak.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Palmatak:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa
3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Palmatak. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Palmatak menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Palmatak.

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Palmatak**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	(60,10)	(63,15)	(67)	(69)	(71)
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Palmatak menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Palmatak berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Tersedianya layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.
2	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur desa	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
		Optimalisasi koordinasi kecamatan dan desa	- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
3	Mendorong partisipasi Masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
		Penguatan program pemberdayaan Masyarakat	- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.)

Tabel. 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,0%	86,0%	5.440.866.141,00	87,0%	5.440.148.462,41	88,0%	5.547.589.350,43	89,0%	5.605.275.243,93	99,0%	5.661.517.996,38	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	100%	100%	2.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	5 Dokumen	300.000,00	5 Dokumen	300.000,00	5 Dokumen	300.000,00	5 Dokumen	300.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung statistik sektoral Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Walidata Pendukung statistik sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.272.352.141,00	100%	5.324.248.462,41	100%	5.376.663.747,03	100%	5.429.603.184,50	100%	5.483.072.016,35	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	19 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	5.169.632.141,00	73 Orang/Bulan	5.221.528.462,41	73 Orang/Bulan	5.273.943.747,03	73 Orang/Bulan	5.326.883.184,50	73 Orang/Bulan	5.380.352.016,35	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	102.720.000,00	12 Dokumen	102.720.000,00	12 Dokumen	102.720.000,00	12 Dokumen	102.720.000,00	12 Dokumen	102.720.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	22.800.000,00	100%	22.800.000,00	100%	22.800.000,00	100%	22.800.000,00	100%	22.800.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.800.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100%	100%	51.614.000,00	100%	FALSE	100%	55.025.603,40	100%	53.714.000,00	100%	62.545.980,03	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0 Paket	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	500.000,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	12 Laporan	24.114.000,00	12 Laporan	26.806.340,00	12 Laporan	27.525.603,40	12 Laporan	26.214.000,00	12 Laporan	35.045.980,03	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang	0 Unit	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	66.058.059,43	100%	60.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	26.058.059,43	12 Bulan	20.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	20.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	20.000.000,00	3 Orang/Bulan	20.000.000,00	3 Orang/Bulan	20.000.000,00	3 Orang/Bulan	20.000.000,00	3 Orang/Bulan	20.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00
	RUTIN			269.234.000,00		216.620.000,00		274.645.603,40		276.392.069,43		279.165.980,03
	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	7.500.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	100%	100%	7.500.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00
	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	412.500.000,00	100%	442.500.000,00	100%	412.500.000,00	100%	451.231.428,50	100%	494.017.435,62
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%	192.000.000,00	100%	222.000.000,00	100%	192.000.000,00	100%	230.731.428,50	100%	273.517.435,62
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Desa	7 Desa	192.000.000,00	7 Desa	222.000.000,00	7 Desa	192.000.000,00	7 Desa	230.731.428,50	7 Desa	273.517.435,62
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	105.500.000,00	100%	105.500.000,00	100%	105.500.000,00	100%	105.500.000,00	100%	105.500.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7 Desa	7 Desa	105.500.000,00	7 Desa	105.500.000,00	7 Desa	105.500.000,00	7 Desa	105.500.000,00	7 Desa	105.500.000,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7 Desa	7 Desa	115.000.000,00	7 Desa	115.000.000,00	7 Desa	115.000.000,00	7 Desa	115.000.000,00	7 Desa	115.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	100%	100%	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	18 Orang	18 orang	180.000.000,00	164 orang	180.000.000,00	227 orang	280.000.000,00	227 orang	300.000.000,00	250 orang	300.000.000,00
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan											
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	30.000.000,00	100%	64.328.661,59	100%	62.611.436,57	100%	62.611.436,57	100%	80.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	30.000.000,00	100%	64.328.661,59	100%	62.611.436,57	100%	62.611.436,57	100%	80.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	7 Dokumen	54.328.661,59	7 Dokumen	52.611.436,57	7 Dokumen	52.611.436,57	7 Dokumen	70.000.000,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	7 Laporan	10.000.000,00	7 Laporan	10.000.000,00	7 Laporan	10.000.000,00	7 Laporan	10.000.000,00
	JUMLAH			6.070.866.141,00		6.136.977.124,00		6.312.700.787,00		6.434.118.109,00		6.656.535.432,00

Kecamatan Palmatak terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan untuk mendukung fungsi utama kecamatan, seperti koordinasi pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penyediaan layanan administrasi. Melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Palmatak menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam hal efisiensi waktu maupun peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sejumlah Program prioritas Kecamatan Palmatak Kab.Kep Anambas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2.

**Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
2	3	4	5
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan Renstra Kecamatan Palmatak Kab. Kep Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indicator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Kecamatan Palmatak Kab. Kep Anambas dalam 5 (Lima) Tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kecamatan Palmatak. Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

Tabel. 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP	(60,10)	(60,10)	(63,15)	(67)	(69)	(71)	(71)
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Palmatak dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Kecamatan Palmatak berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. Kecamatan Palmatak tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tabel 4.6. (Tabel T-C28)
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP	BAIK	60,10	63,15	67	69	71	71	71
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan	BAIK	76,69	76,82	77,45	77,75	77,90	77,90	77,90
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,2	70	75	80	85	90	90	90

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Palmatak periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dok ini mencerminkan komitmen Kecamatan Palmatak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Palmatak optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

TebangLadan, 04 Juni 2025



CAMAT PALMATAK,

WAN RUMADY, S.Pd.SD

Rombina Tk. I / IV.b

NIP. 19680102 199103 1 018